

DAFTAR ISI

Halaman Judul Sampul	i
Halaman Judul	ii
Surat Pernyataan Penulis	iii
Abstrak	iv
Lembar Persetujuan	vii
Lembar Pengesahan	viii
Pedoman Transliterasi	ix
Kata Pengantar dan Ucapan Terima Kasih	xiv
Daftar Isi	xvi
Daftar Tabel	xviii
Daftar Gambar	xix
Daftar Lampiran	xx
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Penelitian	1
B. Rumusan Masalah	10
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Hasil Penelitian	12
E. Hasil Penelitian Terdahulu	13
F. Kerangka Berpikir	19
 BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Konsep Lembaga Keuangan Syariah	25
B. Kosep Pembiayaan Bermasalah dan Debitur Wanprestasi	27
C. Konsep Mitigasi Risiko Pembiayaan Bermasalah	34
D. Denda <i>Ta'zir</i> sebagai Sanksi Disipliner dalam Fikih dan Regulasi	36
1. Konsep Filosofis, Yuridis dan Sosiologis <i>Ta'zir</i>	36
2. Ketentuan <i>Ta'zir</i> dalam Fatwa DSN-MUI No. 17/2000	39
3. Demarkasi Konseptual antara <i>Ta'zir</i> dan <i>Ta'widh</i>	43
E. Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	47
1. Sejarah dan Latar Belakang Kelahiran SLIK	47
2. Konsep Filosofis dan Sosiologis SLIK	49
 BAB III METODOLOGI PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Metode Penelitian	53
B. Jenis dan Sumber Data Penelitian	56
C. Teknik Pengumpulan Data	57
D. Teknik Analisis Data	58

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian	61
1. Kedudukan dan Kekuatan Hukum Fatwa DSN-MUI No. 17/2000 tentang Sanksi <i>Ta'zir</i> dalam Sistem Perbankan Syariah di Indonesia	61
2. Landasan Yuridis dan Implikasi Hukum Sistem Layanan Informasi Keuangan (SLIK)	67
a. Landasan Hukum SLIK	67
b. Karakter Hukum dan Prosedur Permintaan Informasi Debitur melalui SLIK	73
c. Mekanisme Pelaporan dan Dampak Skor Kolektibilitas	76
d. Fungsi Ganda SLIK antara Informasi dan Sanksi Reputasi ..	83
3. Interaksi Fungsional <i>Ta'zir</i> dan SLIK dalam Siklus Penanganan Pembiayaan Bermasalah dan Potensi Konflik Norma terkait Asas Keadilan dan Proporsionalitas Sanksi bagi Debitur Wanprestasi ..	87
a. Deskripsi Integrasi Regulasi dalam Alur Penegakan Sanksi dan Mitigasi Risiko	87
b. Potensi Konflik Norma terkait Asas Keadilan dan Proporsionalitas Sanksi bagi Debitur Wanprestasi	92
4. Analisis Yuridis Korelasi Fatwa dan POJK dalam Menciptakan Keseimbangan antara Mitigasi Risiko dan Perlindungan Hukum Bagi Debitur	95
B. Pembahasan	97
1. Sanksi Kumulatif dan Keadilan Substantif	97
2. Analisis Konflik Norma Fatwa DSN-MUI vs POJK dan Regulasi Lain	106
3. Upaya Harmonisasi Regulasi untuk Keseimbangan dan Keadilan..	110
a. Analisis Rekonstruksi Mekanisme Sanksi Menuju Model Sequential Sanction yang Berkeadilan	115
b. Harmonisasi Prosedural Pengaturan Sekuens dan Ambang Batas	116
c. Harmonisasi Substansial: Objektifikasi Kriteria <i>Ta'zir</i>	118
4. Penguatan Peran Pengadilan Agama dan Basyarnas sebagai Asas <i>Check and Balance</i> Kontrak Syariah	118

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	127
B. Implikasi dan Keterbatasan Penelitian	128
C. Saran	129
Daftar Pustaka	132
Lampiran-lampiran	139
Riwayat Hidup Penulis	162